

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negerinya yaitu Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia dengan kadar di bawah 1,7% tidak lagi diperbolehkan untuk diekspor yang teruang pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kebijakan ini tentu memberi dampak bagi kedua belah pihak yang berseteru. Bagi Indonesia kebijakan ini berdampak dalam meningkatnya PDB Indonesia, meningkatnya produksi turunan nikel di Indonesia, peningkatan investasi di Indonesia, mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia, meningkatkan nilai rantai pasok, dan membuka lowongan pekerjaan.

Dampak bafi Uni Eropa yaitu berkurangnya pasokan global nikel dan mengganggu industri manufaktur di Uni Eropa yang bergantung pada nikel, menyebabkan matinya beberapa pabrik industri nikel di beberapa bagian Eropa, yang tentunya akan mengarah pada meningkatnya pengangguran di negara tersebut. Adanya kebijakan larangan ekspor nikel tentu mengganggu industrisasi Uni Eropa dan juga mengakibatkan melambungnya harga nikel.

Serangkaian peristiwa tersebut juga mempengaruhi hubungan bilateral keduanya yang sudah terjalin sejak lama. Hubungan keduanya cukup memanas pasca ditetapkannya kebijakan tersebut yang dibuktikan dengan gugatan Uni

Eropa kepada Indonesia melalui WTO sebagai bentuk keberatannya terhadap Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia.

Namun kebijakan ini tidak sampai mengganggu hubungan kerja sama bilateral dalam bidang lainnya. Terbukti melalui pertemuan-pertemuan Indonesia-Uni Eropa setelahnya seperti Jakarta adalah rumah diplomatik ASEAN dengan eksekutif yang berbasis di ibukota Indonesia. Jika Brussel sangat ingin meningkatkan hubungan dengan ASEAN, artinya Uni Eropa sering kali harus bekerja melalui Jakarta. Hal ini membuka dialog yang lebih intens untuk menjaga hubungan baik dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan Uni Eropa, di tengah beberapa sengketa dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya selama KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN, Uni Eropa di Gedung Europa, Brussels, Belgia, Rabu 14 Desember 2022, Presiden Jokowi menginginkan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa bersifat inklusif dan berkelanjutan, di tengah tegangnya hubungan Indonesia dengan Uni Eropa terkait sengketa nikel dan perundingan Indonesia-Uni Eropa yang telah memasuki putaran ke-14 pada Bulan Mei 2023. Melalui intensitas kunjungan tersebut, diharapkan terjadinya peningkatan engagement dengan Uni Eropa.

5.2 Saran

Sebagai bagian terakhir dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran praktis

Peneliti memiliki saran bagi Indonesia untuk mengkaji ulang secara matang kebijakan larangan ekspor nikel ini agar meminimalisir kerugian yang diterima dan menjaga kesepakatan bersama dan menjaga stabilitas hubungan kerja sama bilateral yang sudah terjalin.

5.2.2 Saran Teoritis

Bagi peneliti yang tertarik meneliti permasalahan yang serupa mengenai kebijakan larangan ekspor nikel agar meneliti permasalahan yang berbeda seperti bagaimana respon-respon negara konsumen lainnya dalam menyikapi kebijakan ini, sehingga peneliti dapat lebih luas dan objektif dari sudut pandang lain.

Peneliti sadar betul dalam pembahasan penelitian ini referensi yang terkait dengan objek penelitian masih banyak kurangnya, mulai dari buku-buku atau jurnal internasional. Maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini lebih memperkaya lagi terkait referensi-referensi penelitiannya.